

Implementasi Kebijakan Bahasa Bali Dalam Penggunaan Tanda Bahasa Di Ruang Publik

Ketut Artawa¹, Made Sri Satyawati², Ketut Widya Purnawati³, Yendra⁴

¹²Faculty of Language and Culture, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

³⁴STKIP PGRI Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: ¹tutartawa@gmail.com

Abstract: The rapid development of multiculturalism and multilingualism along with the growth of tourism in Bali has greatly contributed to the decline number of Balinese languages speakers. Therefore, in order to empower and promote the sustainable use of the Balinese language and script, the government issued a policy through: Bali Governor Regulation Number 80 of 2018 (Balinese Language Policy). This study discusses the implementation of the Balinese Language Policy in the use of language sign in public spaces, as well-known as Linguistic Landscape (LL). Specifically, the discussion refers to Balinese Language Policy Article 6 paragraph (1) which requires the use of Balinese script above Latin letters in writing names of Hindu places of worship, traditional institutions, inscriptions marking the inauguration of buildings, government institution buildings, private institutions, streets, tourism facilities, and other public facilities. This study conducts qualitative-descriptive method with research procedures, namely an empirical survey of language signs in public spaces, classification of language signs, and analysis of the implementation of Balinese Language Policy on language signs in public spaces. In the analysis of language signs in Balinese LL, signs are classified into 'public signs' and 'personal signs'. Based on the data analysis, it was found that the Balinese Language Policy was implemented effectively in accordance with the policy on public signs. On the contrary, the implementation of the policy on personal signs did not go as effectively as that of the public signs because there were only a small number of people who implemented the policy.

Keywords: *language policy; linguistic landscape; Balinese language, public space signs*

Abstrak: Berkembang pesatnya multikultural dan multibahasa seiring meningkatnya pariwisata di Bali berkontribusi besar terhadap penurunan jumlah penutur bahasa Bali. Oleh sebab itu, dalam rangka memberdayakan dan melestarikan bahasa dan aksara Bali pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 (Kebijakan Bahasa Bali). Penelitian ini membahas bagaimana implementasi Kebijakan Bahasa Bali dari perspektif Lanskap Linguistik (LL), spesifik mengacu pada Pasal 6 ayat (1) yang mewajibkan penggunaan aksara Bali di atas huruf Latin dalam penulisan nama tempat persembahyangan umat Hindu, lembaga adat, prasasti peresmian gedung, gedung lembaga pemerintahan, lembaga swasta, jalan, sarana pariwisata, dan fasilitas umum lainnya. Penelitian ini didesain secara deskriptif kualitatif dengan prosedur penelitian yaitu: survey empiris tanda bahasa di ruang publik, klasifikasi tanda bahasa, dan analisis implementasi Kebijakan Bahasa Bali pada tanda bahasa di ruang publik. Dalam menganalisis tanda bahasa pada LL Bali, tanda diklasifikasikan menjadi tanda publik dan tanda personal. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa implementasi Pergub bali pada tanda publik sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan. Sementara pada tanda personal belum berjalan dengan baik meskipun ada sebahagian kecil yang sudah mengimplementasikannya.

Kata Kunci: *kebijakan bahasa; lanskap linguistik; bahasa bali, tanda ruang publik*

PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata terbesar di Indonesia. Setiap tahunnya, jumlah wisatawan baik lokal (domestik) maupun mancanegara (wisman) ke Bali menunjukkan kenaikan angka yang signifikan. Pada tahun 2018 tercatat 9.757.991,00 wisatawan domestik dan 6.070.473,00 yang mengunjungi Bali (BPS Bali, 2018).

Diagram 1. Jumlah wisatawan Bali, 2010-2018



Signifikansi kenaikan jumlah wisatawan ini kemudian menjadikan Bali sebagai daerah yang multikultur dan secara tidak langsung berimbas terhadap 3,3 juta penutur bahasa lokal Bali (Eberhard, Simons & Fennig, 2019). Pada kondisi ini penggunaan Bahasa non-Bali seperti bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, China, dan bahasa asing lainnya tidak bisa dihindari. Bahasa-bahasa tersebut memainkan peran penting dalam komunikasi dan menjadi instrumen kunci dalam interaksi sosial baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa non-Bali diterjemahkan, dipinjam, atau digunakan, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan komoditas pariwisata dan bisnis (Artawa & Sartini, 2019). Akibatnya, bahasa Bali sebagai bahasa Ibu telah berangsur menjadi bahasa yang marjinal. Fenomena ini diperkuat dengan terjadinya penurunan penggunaan bahasa Bali sebanyak 30,21% (Mustika, 2018; Sutarna & Suandi, 2001). Oleh karena itu, bahasa Bali perlu dilestarikan dan diberdayakan.

Sebagai upaya untuk melestarikan bahasa dan aksara Bali, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali (disebut 'Kebijakan Bahasa Bali'). Dalam Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perlindungan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa bahasa Bali digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi oleh pegawai, guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan masyarakat di lingkungan lembaga pemerintahan dan lembaga swasta pada hari Kamis, Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Provinsi pada tanggal 14 Agustus. Dalam pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama: a. tempat persembahyangan umat Hindu; b. lembaga adat; c. prasasti peresmian gedung; d. gedung; e. lembaga pemerintahan; f. lembaga swasta; g. jalan; h. sarana pariwisata; dan i. fasilitas umum lainnya.

Artikel ini membahas bagaimana implementasi Kebijakan Bahasa Bali dalam penggunaan bahasa dan aksara Bali dari perspektif Lanskap Linguistik (LL), yang spesifik mengacu pada pasal 6 ayat (1). Lebih spesifiknya, artikel ini mengeksplorasi bagaimana bahasa dan aksara Bali membentuk kembali ruang etnis Bali di ruang publik melalui LL, yang disebut oleh Appadurai (1990) dengan istilah '*ethnoscape*' ataupun sebagai '*ethnic (re)modeling of space*' (Amos, 2016). Bidang kajian LL semacam ini biasanya muncul dalam situasi di mana penggunaan bahasa di ruang publik tampaknya terlibat dalam konflik sosial (Shohamy, 2006). Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa banyak studi tentang LL telah mengacu pada kebijakan bahasa dalam berbagai bentuk, baik dengan mengkonseptualisasikan LL sebagai mekanisme di mana pengaruh kebijakan dapat dicapai (Shohamy, 2015) atau dengan memeriksa bagaimana tanda-tanda dapat mengekspresikan perbedaan pendapat dari kebijakan resmi (Rubdy & Ben Said, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kebijakan bahasa pada LL telah dilakukan oleh peneliti LL, diantaranya Rosenbaum, dkk (1977) tentang pengaruh kebijakan bahasa resmi pada penggunaan bahasa di ruang publik di Yerusalem; Tulp (1978) dan Wenzel (1998) tentang visibilitas dua bahasa semi resmi, seperti bahasa

Belanda dan Prancis pada tanda-tanda komersial di berbagai lingkungan di Brussels, Belgia; serta Monnier (1989) tentang konsekuensi kebijakan bahasa "Bill 101" di Provinsi Quebec yang mengatur penggunaan bahasa pada tanda-tanda komersial. Baru-baru ini penelitian juga dilakukan oleh Modan (2009) yang membahas komodifikasi Cina sebagai ornamen kesuksesan komersial menciptakan ruang identitas etnis aslinya; Lou (2010) yang mengeksplorasi presentasi identitas linguistik marjinal oleh kelompok mayoritas; Amos (2015) yang membahas tentang ruang etnik pecinan pada lanskap linguistik di Liverpool; dan Lanza & Woldemariam (2015) yang membahas identitas etnolinguistik Ethiopia di Washington DC.

Dengan melaksanakan penelitian tentang implementasi Kebijakan Bahasa Bali ini, salah satu upaya pelestarian dan pendokumentasian bahasa dan aksara Bali di ruang publik dapat dilakukan. Disamping itu, penelitian ini juga penting dilakukan karena hasilnya bermanfaat untuk menentukan Kebijakan Bahasa Bali lanjutan dalam upaya perlindungan dan pelestarian bahasa dan aksara Bali ke depan.

METODE

Penelitian ini dirancang secara deskriptif kualitatif dengan metode yang mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Modan (2009), Lou (2010), Amos (2015), dan Lanza & Woldemariam (2015). Adapun prosedur yang dilakukan adalah: (1) survey empiris terhadap Lanskap Linguistik (LL) Bali; (2) klasifikasi tanda bahasa pada LL Bali; dan (3) analisis implementasi Kebijakan Bahasa Bali No 80 Tahun 2018 pada tanda bahasa di ruang publik Bali.

Langkah pertama, survey empiris yang dilakukan bukan untuk menghitung jumlah data secara kuantitas melainkan hanya untuk melihat gambaran data secara umum, lalu menangkap detail superdiversifikasi tanda bahasa pada LL. Pada survey empiris ini kegiatan yang dilakukan adalah merekam data dalam serangkaian sistem untuk mengklasifikasikan jenis tanda bahasa, materialitas wacana, kepenulisan, jenis tempat di mana tanda bahasa ditemukan (Amos, 2015; Gorter, 2018). Untuk itu, data LL Bali diambil dengan menggunakan teknik fotografi. Tanda bahasa di ruang publik Bali dipotret lalu disimpan dalam format *digital image*. Kemudian, sample foto yang relevan dan sesuai dengan target analisis akan ditampilkan dalam analisis data. Acuan menjadikan fotografi sebagai teknik pengumpulan data karena salah satu ciri pembeda studi LL adalah penggunaan foto untuk bahan analisis tanda bahasa di ruang publik; dan fotografi ini telah menjadi teknik yang menjadi karakteristik dari banyak studi LL (Aronin & O Laoire, 2012; Gorter, 2018; Yendra & Artawa, 2020).

Langkah kedua, data LL Bali diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (1) tanda bahasa luar ruang resmi (tanda publik/ *public signs*) yang dibuat oleh pemerintah seperti di gedung pemerintah, bandara, pelabuhan, terminal, dan fasilitas publik lainnya; dan (2) tanda bahasa luar ruang tidak resmi (tanda personal/ *private signs*) yang dibuat oleh individu atau kelompok non-pemerintah seperti papan nama pada toko, hotel, restoran, dan tanda komersial lainnya. Hal ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Backhaus (2007). Pengklasifikasian tanda ini dilakukan guna mengetahui siapa pembuat tanda tersebut, dengan begitu akan terlihat kelompok mana yang mengimplementasikan Kebijakan Bahasa Bali sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

Langkah ketiga, analisis data dilakukan untuk melihat preferensi tanda bahasa, lalu mengevaluasi komparasi dari beberapa data. Dengan demikian, kompleksitas beragam dari tanda bahasa yang membangun LL, hubungan antar bahasa di seluruh ruang distribusi komparatifnya, penggunaannya yang bervariasi dalam berbagai konteks, dan konsentrasi di tempat atau jenis tempat tertentu dapat dieksplorasi secara kualitatif. Adapun item-item yang dianalisis diadaptasi dari sistem untuk klasifikasi tanda oleh Amos (2015) yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Sistem untuk analisis tanda di ruang publik

Sistem	Deskripsi	Contoh Gradien
Bahasa	Bahasa yang terdapat dalam tanda	Bahasa Indonesia, Bali, Inggris, Jepang, ...
Multibahasa	Hubungan konten dari tanda yang menggunakan banyak bahasa	Replikasi (konten yang sama), non-relasional (konten berbeda), inter-relasi (konten saling melengkapi)
Fangsi Komunikatif	Maksud dan tujuan dari tanda	Papan nama, informasi, pengumuman, iklan, slogan, ...

Titik/locus	Lokasi/ <i>spot</i> di mana tanda dihadirkan	Di dinding, jendela, spanduk, baliho, pintu, gapura, tempat lainnya, ...
Material	Jenis material untuk membuat tanda	Cat permanen, dicetak (print), graffiti, ...
Konteks Tanda	Tipe dari tempat tanda	Toko, restoran, hotel, rumah, bangunan, situs, pura, ...

Fitur penting dari metodologi ini bukan banyaknya jumlah tanda yang direkam dan dianalisis, akan tetapi analisis satu jenis tanda secara kualitatif dapat dikategorikan merepresentasikan banyak tanda yang identik secara general. Sementara tanda yang bersifat unik didefinisikan secara spasial tergantung kepada fungsi komunikatif teks. Dengan demikian, tanda-tanda yang mengandung lebih dari satu fungsi komunikatif dikategorikan secara terpisah.

PEMBAHASAN

Klasifikasi Jenis Tanda pada Lanskap Linguistik Bali

Pertanyaan utama dari penelitian ini menyakut bagaimana implementasi Kebijakan Bahasa Bali dalam penggunaan bahasa dan aksara Bali dari perspektif Lanskap Linguistik (LL), yang spesifik mengacu pada Pasal 6 ayat (1), yaitu: “Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama: a. tempat persembahyangan umat Hindu; b. lembaga adat; c. prasasti peresmian gedung; d. gedung; e. lembaga pemerintahan; f. lembaga swasta; g. jalan; h. sarana pariwisata; dan i. fasilitas umum lainnya”.

Kebijakan yang tertuang dalam pasal 6 ayat (1) tersebut jelas sejalan dengan konsep Lanskap Linguistik (LL) oleh Landri & Bourhis (1997) yang menyatakan LL di daerah tertentu mencakup bahasa rambu lalu lintas, iklan, baliho, nama jalan, nama tempat, papan iklan toko, papan umum pada gedung-gedung pemerintah. Dalam hal ini, untuk memudahkan analisis implementasi dari Kebijakan Bahasa Bali, maka dari itu jenis tanda pada LL Bali diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tanda publik dan tanda personal.

Tanda publik merupakan tipe spesifik dari tanda semiotik yang berfungsi sebagai sebuah maklumat, pemberitaan, pemberitahuan, dan pengumuman yang dihadirkan (*display*) pada bentangan/ ruang publik (*publik sphere*), yang memberikan informasi atau instruksi dalam bentuk teks dan simbolik (Backhaus, 2007). Dalam konteks LL di ruang publik Bali, tanda publik dihadirkan sebagai tanda penunjuk fasilitas umum dan pelayanan publik, meliputi: gedung pusat pemerintahan (kantor Gubernur, Walikota/ Bupati, kelurahan/ desa, dinas, dan DPRD), fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan klinik), gedung sekolah (SD, SMP, SMA/ SMK), Perguruan Tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, dan Akademi), Pura (tempat sembahyang umat Hindu), papan nama jalan, pasar, gedung museum, pelabuhan udara/ laut, dan terminal bus. Estimasi jumlah sebaran tempat tanda publik pada LL Bali disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Sebaran tempat tanda publik (Sumber: BPS Bali, 2014 - 2020)

Tempat Tanda Publik	Jumlah
Sekolah	6.668
Perguruan Tinggi	71
Gedung Pusat pemerintahan	783
Fasilitas Kesehatan	5.284
Gedung DPRD	10
Pura	4.356
Papan Nama Jalan Utama	112
Pasar	111
Museum	44
Lokasi Wisata	120
Kantor Dinas Pemerintah	49
Pelabuhan Laut	6
Terminal Bus	8

Pelabuhan Udara	1
Total	17.623

Tanda personal pada Lanskap Linguistik (LL) merupakan simbol atau suatu tanda atas suatu objek; suatu yang mengandung (*quality*); atau suatu kegiatan (*event*) yang kemunculannya berkemungkinan memunculkan pula suatu maksud seseorang atas suatu keinginan, atau suatu peristiwa (*occurrence*); atau hal lain-lainnya yang berhubungan dengan suatu konsep yang diinginkan pembuatnya (Backhaus, 2007; Gorter, 2006). Dalam konteks LL di ruang publik Bali tanda personal dikomodifikasi untuk tujuan pariwisata dan bisnis, meliputi: tanda pada papan toko, nama restoran, hotel, dan komodifikasi bisnis lainnya. Estimasi jumlah sebaran tempat tanda personal di ruang publik Bali disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sebaran tempat tanda personal (Sumber: BPS Bali, 2014 - 2020)

Tempat Tanda Personal	Jumlah
Minimarket	1.275
Toko Kelontong	50.152
Restoran	3.233
Hotel	4.487
Kedai/ warung lainnya	98.654
Total	157.801

Dari data sebaran tempat tanda publik pada Tabel 2 dan tanda personal pada Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah tanda personal dengan total 157.801 lebih mendominasi pada LL Bali dibandingkan dengan jumlah tanda publik dengan total hanya 173.623.

Implementasi Kebijakan Bahasa Bali pada Tanda Publik

Berdasarkan analisis data, implementasi Kebijakan Bahasa Bali pada tanda publik sudah terlaksana dengan baik. Dalam artian bahwa penggunaan aksara Bali sudah sesuai dengan ketentuan yang dibuat pemerintah Bali. Tanda-tanda publik seperti papan nama bandara, sekolah, pura, prasasti, dan fasilitas publik lainnya sudah menggunakan aksara Bali dalam penulisannya (lihat contoh Gambar 1 dan 2). Dalam hal ini, tanda publik relatif mudah untuk dikontrol melalui mekanisme kebijakan bahasa karena memang tanda tersebut dibuat oleh lembaga pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan.



Gambar 1: Papan nama Pura



Gambar 2: Papan nama Sekolah

Secara umum, bahasa yang digunakan pada tanda publik seperti contoh pada Gambar 1 dan 2 adalah monobahasa (monolingual), yaitu bahasa Indonesia yang ditulis dengan menggunakan aksara Bali dan huruf Latin. Dalam hal ini, penggunaan aksara Bali baik setelah ataupun sebelum huruf Latin hanya sebatas teknis penulisan. Keduanya sama-sama merupakan transkripsi bahasa Indonesia yang bersifat replikasi. Berkemungkinan besar hal ini terjadi karena pengaruh Kebijakan Bahasa Nasional yang mengatur dan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia di seluruh wilayah (Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019). Menempatkan aksara Bali bersama huruf Latin sebagai transkripsi bahasa Nasional Indonesia pada tanda publik merupakan bentuk diaspora pemerintah lokal Bali, di mana preferensi khusus digunakan untuk zona yang ditentukan secara etnis (lihat. Barni & Vedovelli, 2012; Ben-Rafael & Ben-Rafael, 2012; Malinowski, 2009; Vandenbroucke, 2015). Artinya, aksara Bali digunakan sebagai simbol mengukuhkan ke-etnisasi Bali di ruang publik.

Dalam beberapa data, ditemukan pula tanda publik yang multibahasa (multilingual), di mana terdapat penggunaan lebih dari satu bahasa yang ditulis dengan aksara Bali dan huruf Latin (lihat contoh Gambar 3). Biasanya tanda semacam ini terdapat pada pintu masuk atau gerbang Pura sebagai tempat persembahyangan umat Hindu di Bali.



Gambar 3: Tanda Informasi

Pada Gambar 3 terdapat penggunaan tiga bahasa yang ditranskripsikan dengan menggunakan aksara Bali dan huruf Latin, yaitu Bahasa Indonesia, Bali, dan Inggris. Adapun konten yang dihadirkan yaitu: (1) “*wantah sane jagi muspa*” (transkripsi bahasa Bali dengan Aksara Bali); (2) “*hanya yang sembahyang*” (transkripsi bahasa Indonesia dengan huruf Latin); dan (3) “*do not enter, for prayers only*” (transkripsi bahasa Inggris dengan huruf Latin). Secara relasional ketiga tanda bahasa tersebut merupakan konten yang sama, yang bersifat replikasi dan berfungsi sebagai tanda informatif bagi pengunjung Pura. Secara kontekstual, strategi menghadirkan tanda multibahasa merupakan bentuk fungsi komunikatif dari teks. Dalam hal ini selain tempat persembahyangan umat Hindu, Pura juga merupakan salah satu objek wisata autentik Bali yang banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh sebab itu, strategi menghadirkan tanda multilingual memang ditargetkan berdasarkan klasifikasi pengunjung. Tanda bahasa Bali ditujukan untuk pengunjung lokal Bali, tanda Bahasa Indonesia ditujukan untuk wisatawan domestik, dan tanda bahasa Inggris

ditujukan untuk wisatawan mancanegara. Hal inilah yang disebut oleh Leeman & Modan (2009) sebagai komodifikasi etnis menjadi ornamen kesuksesan komersial yang tidak terlepas dari identitas etnis aslinya.

Implementasi Kebijakan Bahasa Bali pada Tanda Personal

Berbeda halnya dengan tanda publik, implementasi Kebijakan Bahasa Bali pada tanda personal seperti tanda pada papan toko, nama restoran, hotel, dan lainnya belum terlaksana dengan baik (lihat contoh Gambar 4 dan 5). Hal ini disebabkan oleh implementasi penggunaan bahasa dalam bentuk teks tulis di ruang publik adalah proses yang kompleks dan seringkali tidak dapat diprediksi, yang sangat bergantung pada bagaimana aktor lokal menafsirkan dan memberlakukan kebijakan.



Gambar 4: Papan nama hotel



Gambar 5: Papan nama restoran

Secara umum, dari contoh tanda personal seperti pada Gambar 4 dan 5 menunjukkan bahwa terdapat tanda-tanda yang dibuat oleh pihak non-pemerintah yang tidak menggunakan aksara Bali. Fenomena ini umumnya terjadi pada toko, restoran, level menengah kebawah ataupun hotel yang tidak berbintang. Tidak mengherankan bahwa tanda-tanda personal tersebut tidak menggunakan aksara Bali mengingat bahwa mereka diidentifikasi sebagai situs pola dasar identitas komodifikasi bisnis dan pariwisata di Bali. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan baik bahasa Nasional Indonesia maupun bahasa Internasional seperti Bahasa Inggris, Jepang, dan Bahasa asing lainnya yang mendominasi. Meskipun demikian, terdapat juga penggunaan Aksara Bali pada tanda personal, walaupun hanya sekedarnya saja. Tanda personal yang menggunakan aksara Bali ini umumnya adalah kelas perusahaan atau hotel berbintang (lihat contoh Gambar 6).



Gambar 6: Papan nama villa

Pada Gambar 6 terlihat tanda nama hotel/villa yang menggunakan bahasa Inggris dengan transkripsi huruf Latin dan sedikit transkripsi aksara Bali. Munculnya teks-teks dengan menggunakan aksara Bali secara minim seperti contoh pada Gambar 6 merupakan indeks dari bahasa Bali sebagai simbol nilai dan praktik yang terkait dengan etnis Bali dan diaspora. Akan tetapi, tidak begitu jelas apakah aksara Bali yang digunakan menentukan keberadaan komunitas linguistik Bali, atau hanya presentasi simbolik dari strategi partisipasi mendukung kebijakan Bahasa Bali sehingga sejalan dengan komodifikasi pariwisata dan bisnis.

SIMPULAN

Lanskap Linguistik adalah pusat dari konstruksi identitas etnis yang membentuk setidaknya satu dimensi untuk memetakan ruang etnis (*ethnoscape*). Oleh sebab itu, membuat Kebijakan Bahasa Bali dengan menghadirkan preferensi bahasa/ aksara Bali pada Lanskap Linguistik baik berupa tanda publik maupun tanda personal jelas menunjukkan tujuan demarkasi etnis oleh pemerintah Bali. Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa Implementasi Kebijakan Bahasa Bali pada tanda publik sudah terlaksana dengan baik. Pura, prasasti, gapura, dan papan nama gedung pemerintah dilengkapi dengan teks menggunakan bahasa/ aksara Bali. Preferensi bahasa dan aksara Bali yang digunakan pada tanda publik menunjukkan bahwa identitas tempat itu memang penanda simbolik etnis Bali. Hal ini sangat kontras dengan Implementasi Kebijakan Bahasa Bali pada tanda personal, di mana bahasa asing seperti bahasa Inggris, Indonesia, dan bahasa Non-Bali lainnya lebih dominan. Meskipun terdapat juga tanda personal seperti pada toko, restoran, hotel, dan komoditas bisnis lainnya yang menggunakan bahasa/ aksara Bali, akan tetapi tidak begitu jelas apakah bahasa/ aksara Bali yang digunakan menentukan keberadaan komunitas linguistik Bali, atau hanya representasi simbolik dari partisipasi mendukung kebijakan Bahasa Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Amos, H. W. (2016). 'Chinatown by numbers: defining an ethnic space by empirical linguistic landscape.' *Linguistic Landscape*, 2 (2): 127-156.
- Appadurai, A. (1990). 'Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy.' *Theory, Culture and Society*, 7(2-3): 295-310.
- Aronin, L. & Laoire, M. O. (2012). 'The material culture of multilingualism.' Dalam: D. Gorter, H. F. Marten & L. Van Mensel (ed.). *Minority Languages in the Linguistic Landscape* (halaman. 299-318). London: Palgrave-Macmillan.
- Artawa, K. & Sartini, N. W. (2019). 'Linguistic landscapes: A study of human mobility and identity change.' Dalam: Kerr, dkk. (Ed.). *Urban Studies: Border and Mobility* (halaman. 165-172). London: Taylor & Francis Group.
- Backhaus, P. (2007). *Linguistic Landscapes. A Comparative Study of Urban Multilingualism in Tokyo*. Toronto: Multilingual Matters Ltd.

- Barni, M., & Vedovelli, M. (2012). 'Linguistic landscapes and language policies.' Dalam: C. Helot, M. Barni, R. Janssens, & C. Bagna (Ed.). *Linguistic Landscapes, multilingualism and social change* (halaman. 27–38). Frankfurt: Peter Lang.
- Ben-Rafael, E., & Ben-Rafael, M. (2015). 'Linguistic Landscapes in an Era of Multiple Globalization.' *Linguistic Landscape*, 1(1/2): 19–37.
- Ben-Said, S. & Kasanga, L. A. (2016). 'The discourse of protest: frame of identity, intertextuality and interdiscursivity.' Dalam: R. Blackwood, Lanza, E. dan H. Woldemariam (ed.). *Negotiating and Contesting Identities in Linguistic Landscapes*. London: Bloomsbury Publishing.
- Eberhard, David M., Gary F., Simons & Charles D. F. (2019). *Ethnologue: Languages of the World*. Twenty-second edition. Dallas, Texas: SIL International. Online version: <http://www.ethnologue.com>.
- Gorter, D. (2006). 'Introduction: the study of the linguistic landscape as a new approach to multilingualism.' Dalam: D. Gorter (Ed.). *Linguistic Landscape: A New Approach to Multilingualism* (halaman. 1-6). Clevedon–Buffalo–Toronto: Multilingual Matters LTD.
- Gorter, D. (2013). 'Linguistic Landscapes in a Multilingual World.' *Annual Review of Applied Linguistics*, 33(2013): 190-212.
- Gorter, D. (2018). 'Methods and techniques for linguistic landscape research: About definitions, core issues and technological innovations.' *Pre-final version in Putz & Mundt 2018*.
- Landry, R. & Bourhis, R. Y. (1997). 'Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study.' *Journal of Language and Social Psychology*, 16(1): 23-49.
- Leeman, J., & Modan, G. (2009). 'Commodified language in Chinatown: A contextualized approach to linguistic landscape.' *Journal of Sociolinguistics*, 13: 332–362.
- Malinowski, D. (2009). 'Authorship in the linguistic landscape: A multimodal -performative view.' Dalam: E. Shohamy & D. Gorter (Ed.). *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery* (halaman. 107–126). London: Routledge.
- Monnier, D. (1989). 'Langue d'accueil et langue de service dans les commerces à Montréal.' *Québec: Conseil supérieur de la langue française*.
- Mustika, I. K. (2018). 'Pergeseran Bahasa Bali sebagai Bahasa Ibu di Era Global (Kajian Pemertahanan Bahasa).' *Purwadita*, 2(1): 94-102.
- Rosenbaum, Y., Nadel, E., Cooper, R. L. & Fishman, J. A. (1977). 'English on Keren Kayemet Street.' Dalam: J. A. Fishman, R. L. Cooper dan A. W. Conrad (ed.). *The Spread of English* (halaman. 179-196).
- Rubdy, R. & Ben Said, S. (2015). *Conflict, Exclusion and Dissent in the Linguistic Landscape*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
- Shohamy, E. (2015). LL research as expanding language and language policy.' *Linguistic Landscape: An International Journal*, 1(1-2): 152-171.
- Shohamy, E. (2006). *Language Policy: Hidden Agendas and New Approaches*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203387962>.
- Sutama, I. M & Suandi, I. N. (2001). *Loyalitas-Bahasa Penutur Bahasa Bali terhadap Bahasanya. Laporan Penelitian Universitas Udayana*. Bali: Universitas Udayana.
- Tulp, S. M. (1978). 'Reklame en tweetaligheid: Een onderzoek naar de geografische verspreiding van franstalige en nederlandstalige affiches in Brussel.' *Taal En Sociale Inegratie*, 1: 261-288.
- Wenzel, V. (1998). 'Reklame en tweetaligheid in Brussel: Een empirisch onderzoek naar de spreiding van Nederlandstalige en Franstalige affiches.' Dalam: Vrije Universiteit Brussel (ed.). *Brusselse Thema's 3* (halaman. 45-74). Brussels: VUB.
- Vandenbroucke, M. (2015). 'Language visibility, functionality and meaning across various Time Space scales in Brussels' multilingual landscapes.' *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 36(2): 163–181.
- Yendra & Artawa, K. (2020). *Lanskap Linguistik: Pengenalan, Pemaparan, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.